

ABSTRAK

Dalam UU No 6 Tahun 2014, pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan di Kabupaten Pangandaran diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur desa. Pemdes dan BPD merupakan unit terdepan dalam mengayomi masyarakat dan tombak strategis dalam mencapai keberhasilan semua program. Berdasarkan aturan-aturan tersebut Desa Cigugur mempunyai usaha untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan membangun infrastruktur jalan, guna membantu kegiatan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembangunan infrastruktur dan kendala-kendala yang dihadapi pada saat menjalankan pembangunan infrastruktur.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teori. Pertama teori konflik menurut Ralf Dahrendorf, bahwa konflik dianggap sebagai suatu proses sosial yang berlangsung yang melibatkan individu maupun kelompok yang saling menentang (Demartoto, 2010). Ke dua, teori ekonomi politik menurut Mochtar Mas'ood, menyatakan bahwa ekonomi dan politik saling berkaitan, karena keduanya melibatkan kekayaan dan kekuasaan. Dalam konteks politik, pada umumnya mempengaruhi arah kegiatan ekonomi untuk memenuhi kepentingan kelompok yang dominan. Hal ini menunjukkan bahwa siapa yang mempunyai kekuasaan dapat mempengaruhi nilai dan kepentingan yang didukung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti mengambil teknik triangulasi untuk mengkaji keabsahan data dengan beberapa tata cara yang harus dilakukan.

Konflik antara hubungan yang kurang baik antara BPD dengan Pemdes di Desa Cigugur terkait pembangunan jalan Lapang Karet berhasil diselesaikan melalui musyawarah yang menghasilkan solusi untuk kedua belah pihak serta pembentukan TPK untuk mengatasi masalah pembangunan jalan Lapang Karet. Dalam perspektif ekonomi politik, Pemdes memiliki kekuasaan dalam mengelola pembangunan infrastruktur Desa Cigugur dengan melibatkan masyarakat dan BPD secara transparan. Meskipun terjadi miskomunikasi dengan BPD, pembangunan tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi dalam pembangunan desa.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa.

ABSTRACT

In Law No. 6 of 2014, village development is an effort to improve the quality of life of the community and increase the welfare of the village community as much as possible. In accordance with Pangandaran Regency Regional Regulation (Perda) number 4 of 2021, development in Pangandaran Regency is directed at improving the quality of village infrastructure. The village administration and BPD are the leading unit in protecting the community and the strategic spearhead in achieving the success of all programs. Based on these regulations, Cigugur Village has an effort to prosper its community by building road infrastructure, in order to help the daily activities of the community. This study aims to determine the process of infrastructure development and the obstacles faced when carrying out infrastructure development.

In this study, researchers used conflict theory according to Based on the problems in this study, the authors took conflict theory according to Ralf Dahrendorf, that conflict is considered as an ongoing social process involving individuals and groups that oppose each other (Demartoto, 2010).

The method used in this research is descriptive method with qualitative approach through case study. The informants of this research were determined by purposive sampling technique. Data collection techniques by means of interviews, observation, and documentation. Researchers take triangulation techniques to assess the validity of data with several procedures that must be carried out.

There was a conflict between the BPD (Village Consultative Body) and the Pemdes (Village Government) of Cigugur in the construction of road infrastructure in Cigugur Village, specifically on Lapang Karet road. This conflict arose due to differences of opinion in the distribution of wages for road construction workers, where the BPD was in favor of direct wages to workers while the Pemdes wanted to organize through the RT to overcome the problem of an unpredictable number of workers.

Keywords: Village Consultative Body (BPD), Village Government.